

Laporan: Firman, Baubau Post-Durasi Times

Pembukaan asesmen turut dihadiri Kepala Biro SDM Polda Sultra Kombes Pol. Dr. Arief Fitrianto, S.H., S.I.K., M.M., mewakili Kapolda Sultra, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan yang juga Ketua Panitia Seleksi La Ode Harwanto, S.Pd., M.Pd., Ketua Tim Asesmen dari Mabes Polri, Plt. Kepala BKPSDM Buton Selatan, para asesor, serta seluruh peserta seleksi. Pelaksanaan asesmen dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 24-25 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Bupati Muhammad Adios menegaskan bahwa proses seleksi terbuka bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan, melainkan bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. "Seleksi terbuka ini bukan sekadar pengisian jabatan, tetapi upaya menghadirkan kepemimpinan birokrasi yang mampu membawa perubahan, mendorong inovasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat," ujarnya.

Menurut Adios, pemerintah daerah berkomitmen menerapkan sistem merit dalam setiap pengi-

BUTON SELATAN



GANDENG POLDA SULTRA, BUPATI BUTON SELATAN H MUH ADIOS RESMIKAN ASESMEN JPT,

57 ASN PEREBUTKAN 10 JABATAN STRATEGIS

BUTON SELATAN – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan resmi memulai tahapan asesmen Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dengan melibatkan 54 ASN untuk memperebutkan 10 jabatan strategis. Kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A., di Aula Dhacara SDM Polda Sulawesi Tenggara, Kendari, Rabu (24/6/2026).

Seleksi terbuka ini bukan sekadar pengisian jabatan, tetapi upaya menghadirkan kepemimpinan birokrasi yang mampu membawa perubahan, mendorong inovasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

H. MUHAMMAD ADIOS, S.SOS., M.B.A.
BUPATI BUTON SELATAN

10 JABATAN YANG DIBUKA

- 1 Kepala Dinas Pendidikan
- 2 Kepala Dinas Kesehatan
- 3 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4 Kepala Dinas Perhubungan
- 5 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 6 Kepala Dinas Perikanan
- 7 Kepala Dinas Ketahanan Pangan
- 8 Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 9 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 10 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

MELAHIRKAN PEMIMPIN BIROKRASI YANG KOMPETEN, BERINTEGRITAS, DAN BERKINERJA UNTUK BUTON SELATAN YANG LEBIH MAJU!

KUNCI INFORMASI

24-25 JUNI 2026
Pelaksanaan asesmen selama 2 hari

54 ASN PESERTA
Dari 57 yang lolos seleksi administrasi

10 JABATAN STRATEGIS
Diperebutkan dalam seleksi terbuka JPT Pratama

Assessment Center Polri menjalankan seluruh proses secara profesional, independen, objektif, dan akuntabel.

KOMBES POL. DR. ARIEF FITRIANTO, S.H., S.I.K., M.M.
KARO SDM POLDA SULTRA

Lanjut ke Hal: 7

Empat Kafilah Buton Selatan Tembus Final MTQ Sultra, Emas Perdana Diraih Fahmil Putri, Kepala Kemenag Busel H Khalifah Optimistis Buton Selatan Tambah Medali



Laporan: Ardi

U N A A H A , BP-Kafilah Kabupaten Buton Selatan membuka peluang besar menambah koleksi prestasi pada Musabaqah Tilawatil Qur'an

(MTQ) XXXI Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara setelah empat cabang lomba berhasil menembus babak final. Dari empat nomor tersebut, cabang

Lanjut ke Hal: 7

Wali Kota H Yusran Fahim dan Wawali Wa Ode Hamsinah Sambut Kafilah Baubau di Konawe, Fokus Raih Prestasi Terbaik



Laporan: Prasetyo

KONAWA, BP-Pemerintah Kota Baubau menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung Kafilah Kota Baubau pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXXI

Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026. Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, SE bersama Wakil Wali Kota Baubau Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc., didampingi Ketua TP PKK Kota Baubau

Hj. Sitti Aryati Yusran, hadir langsung di Kabupaten Konawe untuk memastikan kesiapan para peserta sekaligus memberikan motivasi agar mampu meraih prestasi terbaik

Lanjut ke Hal: 7

ASKOT PSSI Baubau Periode 2026-2030 Dinahkodai Badaruddin Resmi Dikukuhkan, Pemkot Baubau Dorong Fokus Cetak Talenta Muda untuk Bangkitkan Prestasi Daerah



Laporan: Ardi

B A U B A U , BP-Kepengurusan baru Asosiasi Kota (ASKOT) PSSI Kota Baubau periode 2026-2030 resmi dikukuhkan di Aula Palagimata, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Baubau, Sabtu (27/6/2026). Penguatan tersebut menjadi titik awal penguatan tata kelola organisasi sekaligus percepatan pembinaan sepak bola usia dini se-

bagai fondasi peningkatan prestasi sepak bola Kota Baubau. Ketua Umum ASKOT PSSI Kota Baubau, H. Badaruddin, SE, menyatakan kepengurusan yang baru akan menjalankan amanah organisasi dengan fokus membangun sistem pembinaan pemain muda serta menghidupkan kembali kompetisi

Lanjut ke Hal: 7

Lebaran Yatim 2026 dan Momentum Muharam, Kemenag Buton Selatan Tebar Manfaat Dengan Salurkan 270 Paket Santunan untuk Anak Yatim dan Kelompok Disabilitas



Laporan: Ardi

BUTON SELATAN, BP-Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Buton Selatan menyalurkan 270 paket santunan kepada anak yatim dan penyandang disabilitas dalam peringatan Lebaran Yatim dan Disabilitas Tahun 2026 yang digelar di Gedung Lamaindo, Batauga, Kamis (25/6/2026). Program yang mengusung tema "Pesan Inklusif untuk Negeri, Menebar Maslahat, Menguatkan Umat tersebut menjadi bagian dari gerakan

nasional Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah dan disiarkan secara virtual.

Kepala Kantor Kemenag Buton Selatan yang diwakili Kepala Subbagian Tata Usaha, H. Muh. Ilham Ibnu Wahid, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda berbagi, tetapi juga bentuk penguatan nilai inklusivitas dan penghormatan

Lanjut ke Hal: 7

Gandeng Polda Sultra, Bupati Buton Selatan H Muh Adios Resmikan Asesmen JPT, 57 ASN Perebutkan 10 Jabatan Strategis

jabatan. “Setiap pengisian jabatan harus dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan integritas, bukan atas pertimbangan lain di luar ketentuan yang berlaku,” tegasnya. Ia juga meminta seluruh peserta mengikuti setiap tahapan asesmen secara serius karena hasilnya akan menjadi dasar penempatan pejabat sekaligus pemetaan kompetensi ASN.

Sepuluh posisi yang dibuka dalam seleksi tersebut meliputi Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas

Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kepala Biro SDM Polda Sultra Kombes Pol. Arief Fitrianto menyatakan Assessment Center Polri menjalankan seluruh proses secara profesional, independen, objektif, dan akuntabel. “Melalui proses seleksi yang ketat dan objektif, diharapkan lahir pemimpin-pemimpin birokrasi yang profesional, berintegritas, mampu membangun kolaborasi, menghadirkan inovasi, serta memberikan kontribusi nyata bagi percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di

Kabupaten Buton Selatan,” katanya.

Data panitia menunjukkan semula terdapat 57 peserta yang lolos seleksi administrasi. Namun, tiga orang tidak mengikuti asesmen karena telah menjalani asesmen JPT Pratama beberapa bulan sebelumnya dan hasil penilaiannya masih dapat digunakan dalam proses seleksi kali ini, sehingga jumlah peserta yang mengikuti asesmen menjadi 54 ASN.

Secara historis, mekanisme seleksi terbuka bagi Jabatan Pimpinan Tinggi di Indonesia semakin diperkuat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menekankan penerapan sistem merit

dalam manajemen ASN. Di tingkat internasional, praktik serupa juga diterapkan di berbagai negara dengan tata kelola pemerintahan modern sebagai instrumen untuk memastikan promosi pejabat publik dilakukan berdasarkan kompetensi, integritas, dan kinerja sehingga mampu menciptakan birokrasi yang efektif dan akuntabel.

Melalui pelaksanaan asesmen ini, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap memperoleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang mampu mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. (*)

Wali Kota H Yusran Fahim dan Wawali Wa Ode Hamsinah Sambut Kafilah Baubau di Konawe, Fokus Raih Prestasi Terbaik

pati Konawe, Unaaha, Selasa (23/6/2026). Selain memberikan dukungan moril, Pemerintah Kota Baubau juga meninjau secara langsung kondisi peserta yang akan bertanding pada berbagai cabang perlombaan MTQ tingkat provinsi.

Wakil Wali Kota Baubau Wa Ode Hamsinah Bolu mengatakan, pemerintah sengaja hadir untuk memastikan seluruh peserta berada dalam kondisi terbaik sebelum memasuki arena perlombaan. Menurutnya, kesiapan mental dan fisik menjadi faktor penting dalam menentukan hasil yang akan dicapai.

“Kami bersama Bapak Wali Kota dan Ibu Ketua TP PKK datang langsung untuk melihat kondisi seluruh peserta. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat sehingga kami berharap mereka dapat tampil maksimal,” ujar Wa Ode Hamsinah Bolu.

Ia menjelaskan, seluruh peserta Kota Baubau telah tiba di Kabupaten Konawe sekitar tiga hari sebelum pembukaan MTQ. Waktu tersebut dimanfaatkan untuk beradaptasi dengan lingkungan, mengenali lokasi perlombaan, serta meningkatkan intensitas latihan sehingga saat memasuki pertandingan para peserta telah siap secara teknis maupun mental.

Tidak hanya meninjau peserta, Pemerintah Kota Baubau juga mengikuti rangkaian kegiatan pra-pembukaan MTQ. Wa Ode Hamsinah mengungkapkan, dirinya tiba di Konawe pada Senin sore dan malam harinya menghadiri malam ta’aruf di Rumah Jabatan Bupati Konawe. Kegiatan tersebut diikuti seluruh kafilah dari 17 kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara, sekaligus menjadi momentum pengambilan sumpah majelis hakim yang akan memimpin penilaian seluruh cabang perlombaan.

“Malam ta’aruf menjadi ajang mempersiapkan silaturahmi antarkafilah sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian MTQ tingkat provinsi,” katanya.

Pada MTQ XXXI Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026, Kota Baubau mengirimkan 47 peserta yang mengikuti berbagai cabang lomba. Bersama pelatih, ofisial, dan pendamping, jumlah rombongan mencapai sekitar 86 orang. Pemerintah Kota Baubau menaruh harapan besar terhadap para peserta mengingat sebagian di antaranya merupakan juara pada MTQ sebelumnya sehingga telah memiliki pengalaman bertanding di level provinsi.

Selain mengikuti seluruh cabang perlombaan, Kafilah Kota Baubau turut ambil bagian dalam Pawai Ta’aruf yang diikuti seluruh daerah peserta. Penampilan mobil hias yang dibawa Kota Baubau menjadi salah satu objek penilaian dalam rangkaian MTQ dan diharapkan mampu memberikan tambahan prestasi bagi daerah.

“Semoga mobil hias Kota Baubau juga dapat meraih penghargaan. Yang paling pent-

ing, seluruh peserta mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya dan mengharumkan nama daerah,” ungkapnya.

Wa Ode Hamsinah menegaskan, Pemerintah Kota Baubau optimistis mampu meningkatkan capaian dibanding pelaksanaan MTQ sebelumnya. Meski demikian, pemerintah tidak membebani peserta dengan target yang berlebihan. Fokus utama adalah menjaga sportivitas, kesehatan, serta memberikan penampilan terbaik sebagai hasil dari proses pembinaan yang telah dilakukan selama ini.

“Kami berharap Kota Baubau mampu meraih hasil yang membanggakan, bahkan berpeluang menjadi juara umum. Namun kami ingin seluruh peserta tetap percaya diri, menjaga kesehatan, dan berlomba dengan menjunjung tinggi sportivitas,” tegasnya.

Pelaksanaan MTQ merupakan agenda nasional yang diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Kegiatan ini tidak hanya menjadi arena kompetisi membaca, menghafal, memahami, dan menafsirkan Al-Qur’an, tetapi juga menjadi instrumen pembinaan sumber daya manusia yang berkarakter religius. Sejak pertama kali digelar secara nasional pada 1968 di Makassar, MTQ terus berkembang dengan penambahan berbagai cabang lomba, termasuk tafsir, kaligrafi, karya tulis ilmiah Al-Qur’an, hadis, hingga musabaqah karya inovatif berbasis nilai-nilai Al-Qur’an.

Secara internasional, tradisi perlombaan tilawah Al-Qur’an juga berkembang di berbagai negara muslim, seperti Malaysia, Arab Saudi, Iran, Brunei Darussalam, dan Mesir. Malaysia bahkan telah menyelenggarakan International Quran Recital and Memorisation Assembly sejak awal 1960-an yang diikuti qari dan qariah dari puluhan negara. Kehadiran ajang-ajang internasional tersebut mendorong peningkatan kualitas pembinaan tilawah Al-Qur’an di berbagai negara, termasuk Indonesia yang selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan prestasi membanggakan pada kompetisi Al-Qur’an tingkat dunia.

Bagi Pemerintah Kota Baubau, keikutsertaan dalam MTQ XXXI Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tidak hanya diukur dari raihan juara. Lebih jauh, ajang tersebut diharapkan menjadi media memperkuat pembinaan generasi Qurani yang memiliki akhlak mulia, kecintaan terhadap Al-Qur’an, serta mampu menjadi teladan di tengah kehidupan masyarakat. Dengan dukungan penuh pemerintah daerah, pengalaman para peserta, dan pembinaan yang berkelanjutan, Kota Baubau optimistis mampu mencatatkan prestasi yang lebih baik pada MTQ tahun 2026. (*)

Empat Kafilah Buton Selatan Tembus Final MTQ Sultra, Emas Perdana Diraih Fahmil Putri, Kepala Kemenag Busel H Khalifah Optimistis Buton Selatan Tambah Medali

Fahmil Qur’an Putri lebih dahulu mempersembahkan medali emas bagi daerah usai menjadi juara pertama pada babak final yang digelar di Aula Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Konawe, Sabtu (27/6/2026).

Keberhasilan itu diraih setelah tim Fahmil Qur’an Putri tampil meyakinkan saat menghadapi utusan Kabupaten Bombana dan Kabupaten Konawe Selatan. Kekompakan, ketelitian, serta kecepatan menjawab soal menjadi faktor yang mengantarkan tim Buton Selatan keluar sebagai pemenang dan menyumbangkan emas perdana bagi kafilah.

Sementara itu, tiga cabang lainnya yang juga memastikan tiket ke partai puncak ialah Qiraat Murattal Dewasa Putra, Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an (KTIQ) Putra, dan Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an (KTIQ) Putri. Ketiga finalis tersebut dijadwalkan kembali bertanding untuk mem-

perebutkan medali terbaik pada MTQ XXXI Sulawesi Tenggara yang berlangsung di Kabupaten Konawe.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan H Khalifah mengatakan capaian tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh peserta, pelatih, official, serta dukungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dan masyarakat. Menurutnya, prestasi yang diraih menjadi bukti bahwa pembinaan yang dilakukan selama ini berjalan pada arah yang tepat.

“Panggung MTQ ini bukan sekadar tentang siapa yang paling lantang membaca atau paling cepat menjawab. Ini tentang ikhtiar, doa, dan keberanian untuk memberikan yang terbaik bagi daerah yang kita cintai,” kata H. Khalifah.

Ia juga memberikan motivasi kepada tiga finalis yang masih akan bertanding. “Jangan takut dan jangan ragu. Kalian sudah menang

dalam proses persiapan, sekarang saatnya menang dengan keyakinan. Tunjukkan bahwa generasi Qur’ani Buton Selatan adalah generasi yang tangguh dan berprestasi,” ujarnya.

Menurut H. Khalifah, keberhasilan Fahmil Qur’an Putri hendaknya menjadi penyemangat bagi seluruh anggota kafilah. “Emas perdana ini semoga menjadi pembuka pintu keberkahan dan kemenangan berikutnya untuk Kafilah Buton Selatan. Pulanglah dengan kepala tegak karena kalian telah mengharumkan nama daerah,” katanya.

Turut mendampingi kafilah selama pelaksanaan MTQ ialah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Buton Selatan Aslia, Kepala Seksi Bimas Islam La Ode Isman, pelatih Mutawally, beserta jajaran official. MTQ XXXI Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara berlangsung di Kabupaten Konawe sejak 22 Juni dan dijadwalkan berakhir pada 28 Juni 2026.

Secara historis, Musabaqah Tilawatil Qur’an merupakan agenda pembinaan keagamaan yang telah menjadi tradisi nasional sejak penyelenggaraan MTQ Nasional pertama di Makassar pada 1968. Sejak itu, MTQ berkembang menjadi wahana peningkatan kualitas tilawah, hafalan, tafsir, karya ilmiah Al-Qur’an, hingga penguatan syiar Islam di seluruh Indonesia. Di tingkat internasional, berbagai negara juga rutin menggelar kompetisi Al-Qur’an, seperti International Holy Quran Competition di Arab Saudi, Malaysia International Quran Recital Assembly, dan Dubai International Holy Quran Award, yang menjadi ajang pengembangan kapasitas qari dan qariah dari berbagai belahan dunia. Keberhasilan Buton Selatan menembus sejumlah babak final di MTQ Sulawesi Tenggara menjadi bagian dari upaya mencetak generasi Qur’ani yang mampu bersaing, baik di tingkat nasional maupun internasional. (*)

Lebaran Yatim 2026 dan Momentum Muharam, Kemenag Buton Selatan Tebar Manfaat Dengan Salurkan 270 Paket Santunan untuk Anak Yatim dan Kelompok Disabilitas

Ia menambahkan, masyarakat Buton sejak lama memiliki tradisi Pakandean Ana-Ana Mae-lu, yakni budaya menyantuni dan memuliakan anak yatim pada bulan Muharam. “Nilai-nilai lokal tersebut menjadi fondasi yang selaras dengan semangat kemanusiaan dan ajaran agama yang terus kita hidupkan hingga sekarang,” katanya.

Laporan panitia yang disampaikan Kepala Seksi Pendidikan Islam Kemenag Buton Selatan, Sibarudin, S.Ag., M.Fil.I., menyebutkan sebanyak 270 paket santunan berhasil dihimpun melalui kolaborasi berbagai pihak. “Seluruh bantuan berasal dari dukungan BAZNAS Buton Selatan serta sumbangan sukarela ASN Kemenag, anggota Dharma Wanita Persatuan, dan pengurus AGPAII yang kemudian disalurkan kepada penerima manfaat di berbagai wilayah Ka-

bupaten Buton Selatan,” jelasnya.

Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Buton Selatan, H. Wahid, yang mengapresiasi sinergi antarlembaga dalam memperkuat perlindungan sosial. “BAZNAS siap terus bersinergi melalui pendanaan maupun program keberlanjutan agar anak yatim dan penyandang disabilitas memperoleh perhatian yang layak,” katanya di hadapan peserta kegiatan.

Acara tersebut dihadiri pimpinan BAZNAS Kabupaten Buton Selatan, pejabat pengawas di lingkungan Kemenag, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kemenag Buton Selatan, para kepala madrasah, kepala KUA kecamatan, kepala AGPAII, Ketua PGMI, aparat sipil negara di lingkungan Kemenag,

serta para penerima manfaat. Prosesi diakhiri dengan penyerahan simbolis paket santunan dan foto bersama seluruh peserta.

Secara historis, perhatian terhadap anak yatim merupakan bagian penting dalam tradisi Islam dan menjadi salah satu semangat yang mendorong lahirnya berbagai program filantropi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Agama RI secara konsisten menggelar peringatan Lebaran Yatim pada bulan Muharam sebagai momentum memperkuat solidaritas sosial melalui pemberdayaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Di tingkat internasional, upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dan perlindungan anak juga sejalan dengan komitmen global melalui Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) serta Con-

vention on the Rights of the Child (CRC) yang menjadi rujukan banyak negara dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menekankan prinsip no one left behind atau tidak meninggalkan siapa pun dalam proses pembangunan.

Melalui kolaborasi antara Kemenag Buton Selatan, BAZNAS, ASN, Dharma Wanita Persatuan, dan organisasi profesi, penyaluran 270 paket santunan diharapkan tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga memperkuat budaya gotong royong, memperluas akses sosial bagi penyandang disabilitas, serta menumbuhkan optimisme anak-anak yatim untuk terus meraih pendidikan dan masa depan yang lebih baik. (*)

ASKOT PSSI Baubau Periode 2026-2030 Dinahkodai Badaruddin Resmi Dikukuhkan, Pemkot Baubau Dorong Fokus Cetak Talenta Muda untuk Bangkitkan Prestasi Daerah

si sepak bola di daerah.

Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan menjadi syarat utama agar Baubau mampu melahirkan pesepak bola berkualitas.

“Kami siap menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, terutama dalam pembinaan pemain muda dan menghadirkan kembali kompetisi di Kota Baubau,” ujar H. Badaruddin.

Komitmen tersebut mendapat dukungan penuh Pemerintah Kota Baubau. Dalam sambutan Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Dr. Mohamad Tasdik, M.Si, ditegaskan bahwa pelantikan pengurus ASKOT PSSI bukan sekadar agenda seremonial, melainkan amanah besar untuk membangun ekosistem sepak bola yang sehat, profesional, dan berdaya saing.

“Pengukuhan ini bukan sekadar seremoni administratif, tetapi merupakan amanah untuk membina dan memajukan sepak bola daerah,” kata Mohamad Tasdik saat membacakan sambutan Wali Kota.

Pemerintah Kota Baubau juga menitikpkan seju-

lah agenda strategis kepada manajemen baru, antara lain menghidupkan kembali Sekolah Sepak Bola (SSB), memperbanyak kompetisi pelajar, memperluas pencarian bakat hingga tingkat kelurahan, membangun kompetisi berjenjang, menerapkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel, serta menjunjung tinggi sportivitas dengan menolok segala bentuk kekerasan maupun praktik pengaturan skor (match fixing).

“Sepak bola adalah olahraga rakyat yang menyatukan tanpa membedakan suku, golongan, maupun status sosial. Ketika anak-anak Baubau berlaga di lapangan, yang bersorak adalah satu kota, satu kebanggaan, dan satu harapan,” demikian kutipan sambutan Wali Kota Baubau.

Menurut Wali Kota, pemerintah daerah akan terus mendukung pembinaan olahraga melalui peningkatan sarana dan prasarana, dukungan terhadap kompetisi, serta sinergi program kepemudaan dan olahraga. Namun, keberhasilan sepak bola tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pengurus, klub, sekolah,

dunia usaha, media, hingga masyarakat pencinta sepak bola.

Secara historis, pembinaan usia dini telah menjadi fondasi perkembangan sepak bola di berbagai negara. Jepang, misalnya, mulai membangun sistem pembinaan modern setelah berdirinya J.League pada 1993 yang terintegrasi dengan akademi klub. Di tingkat nasional, PSSI juga terus memperkuat pembinaan usia muda melalui Elite Pro Academy dan berbagai kompetisi kelompok umur sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing sepak bola Indonesia di tingkat Asia dan dunia.

Pengukuhan ASKOT PSSI Kota Baubau diawali dengan pembacaan pernyataan pengesahan kepemimpinan, dilanjutkan penyerahan petikan keputusan dan pataka organisasi, kemudian ditutup dengan sesi foto bersama. Dengan kepemimpinan baru periode 2026-2030, ASKOT PSSI Kota Baubau diharapkan mampu membangun pembinaan yang berkelanjutan, melahirkan atlet berprestasi, sekaligus mengembalikan kejayaan sepak bola daerah hingga mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. (*)

Lampung Jadi Titik Awal Safari Politik Jokowi, Konsolidasi PSI Tuai Apresiasi



Presiden RI ke 7 Jokowi

Laporan: Alwan

J A K A R T A , BP- Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) memulai safari politiknya bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari Provinsi Lampung. Pilihan tersebut didasarkan pada keberhasilan konsolidasi organisasi PSI di daerah itu yang dinilai hampir menuntaskan pembentukan struktur kepengurusan hingga tingkat desa, sekaligus menjadi momentum untuk mendorong kader partai lebih aktif melayani masyarakat.

Kunjungan yang berlangsung di Kabupaten Mesuji, Lampung, pada Jumat (26/6), menjadi agenda politik pertama Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Dalam kesempatan itu, ia memberikan apresiasi terhadap kerja organisasi PSI yang dinilai mampu membangun jaringan kepengurusan secara menyeluruh hingga ke akar rumput.

Menurut Jokowi, keberhasilan membentuk kepengurusan hingga tingkat desa merupakan modal strategis bagi sebuah partai politik dalam memperkuat komunikasi dengan masyarakat sekaligus membangun organisasi yang solid di daerah.

“Saya ingin memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran PSI yang telah menyele-

saikan struktur partai sampai ke tingkat desa. Yang lain saya lihat masih 40 sampai 60 persen, di sini sudah hampir 100 persen,” ujar Jokowi.

Selain memberikan penghargaan kepada jajaran PSI Lampung, Jokowi menegaskan bahwa alasan lain memilih Lampung sebagai titik awal safari politik adalah karena kedekatannya dengan masyarakat di provinsi tersebut yang menurutnya tetap terjaga hingga saat ini.

“Untuk apa saya datang ke Provinsi Lampung? Untuk apa saya datang ke Kabupaten Mesuji? Pertama, kecintaan saya kepada masyarakat Lampung tidak luntur, masih tetap,” kata Jokowi.

Ia menilai keberadaan struktur organisasi yang lengkap belum cukup apabila tidak diikuti dengan aktivitas nyata di tengah masyarakat. Karena itu, pengurus partai diminta memastikan organisasi berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi warga.

“Setelah struktur partai lengkap sampai ke desa, pekerjaan berikutnya adalah membuat struktur itu hidup dan bekerja. Artinya seluruh pengurus harus dekat dengan masyarakat, bukan hanya ketika menjelang pemilu, tetapi setiap hari,” tegasnya.

Jokowi juga

mengingatn bahwa kekuatan partai politik tidak hanya ditentukan oleh jumlah kepengurusan, melainkan oleh kemampuan organisasi membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang berkesinambungan. Menurutnnya, kedekatan dengan masyarakat harus menjadi budaya politik yang terus dipelihara, bukan sekadar strategi menghadapi kontestasi elektoral.

Secara historis, Lampung memiliki posisi penting dalam dinamika politik nasional. Provinsi yang berada di gerbang Pulau Sumatra itu kerap menjadi salah satu daerah dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dalam berbagai pemilu dan pemilihan presiden. Letak geografisnya yang strategis menjadikan Lampung sebagai wilayah penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatra, sehingga memiliki nilai politik dan ekonomi yang signifikan.

Dalam sejarah politik Indonesia, penguatan organisasi hingga tingkat desa juga menjadi salah satu strategi utama partai-partai politik sejak era reformasi 1998. Kehadiran struktur yang menjangkau masyarakat bawah dinilai mampu memperkuat kaderisasi, pendidikan politik, sekaligus memperluas partisipasi publik dalam sistem demokrasi.

Fenomena terse-

but sejalan dengan praktik politik di berbagai negara demokrasi. Di sejumlah negara seperti Jepang, Jerman, dan India, partai politik yang memiliki jaringan organisasi kuat hingga tingkat lokal umumnya lebih efektif dalam membangun komunikasi politik, menyerap aspirasi masyarakat, dan mempertahankan dukungan elektoral dalam jangka panjang.

Safari politik yang diawali dari Lampung tersebut sekaligus memperlihatkan perhatian Jokowi terhadap penguatan organisasi politik berbasis masyarakat. Melalui kunjungan itu, ia berharap kepengurusan PSI yang telah terbentuk dapat terus bekerja secara aktif, menjaga kedekatan dengan warga, serta menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata di luar momentum pemilu.

Kunjungan tersebut juga menjadi sinyal bahwa konsolidasi organisasi di tingkat akar rumput masih menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kekuatan politik di Indonesia. Jokowi menekankan bahwa keberhasilan sebuah partai tidak hanya diukur dari kelengkapan administrasi organisasi, tetapi juga dari konsistensi kader dalam melayani masyarakat secara berkelanjutan. (*)

Sekjen Partai Buruh Mundur, ORI Resmi Tarik 1,3 Juta Anggota dari Struktur Partai



Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Dinamika internal Partai Buruh memasuki babak baru setelah Sekretaris Jenderal Partai Buruh Ferri Nuzarli menyatakan mengundurkan diri bersama sekitar 1,3 juta anggota dan pengurus Organisasi Rakyat Indonesia (ORI). Keputusan yang diumumkan pada Jumat (26/6) itu diambil menyusul perbedaan pandangan mengenai arah perjuangan politik yang dinilai semakin mendasar.

Pengunduran diri tersebut tidak hanya melibatkan Ferri sebagai Sekretaris Jenderal, tetapi juga jajaran pengurus ORI yang selama ini menjadi salah satu organisasi pendiri Partai Buruh. Seluruh pengurus ORI yang masih menduduki jabatan struktural di partai diminta segera mengajukan surat pengunduran diri secara administratif.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Ferri menegaskan keputusan itu lahir setelah melalui proses evaluasi yang panjang dan melibatkan berbagai masukan dari pengurus di daerah.

“Keputusan ini bukan hal yang mudah. Namun setelah berbagai pertimbangan dan evaluasi, kami melihat sudah ada perbedaan pandangan, sikap, serta arah perjuangan yang semakin mendasar,” ujar Ferri.

Menurut Ferri, ORI merupakan sayap politik Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang dipimpin Andi Gani. Organisasi tersebut berdiri pada 2013 dan menjadi salah satu dari 11 organisasi yang menggagas lahirnya Partai Buruh melalui Kongres I pada Oktober 2021.

Ia menjelaskan, keputusan meninggalkan Partai Buruh berlaku bagi sekitar 1,3 juta anggota ORI yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Langkah tersebut, kata

dia, diambil secara sadar sebagai hasil evaluasi bersama seluruh jajaran organisasi.

“Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, ORI yang beranggotakan sekitar 1,3 juta orang memutuskan mulai Jumat mengundurkan diri,” katanya.

Ferri juga menginstruksikan seluruh pengurus ORI maupun KSPSI Andi Gani yang saat ini masih menjabat sebagai pengurus Partai Buruh, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, agar segera menyampaikan surat pengunduran diri sebagai bagian dari proses administrasi organisasi.

Wilayah yang terdampak pengunduran diri tersebut meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, hingga Papua.

Meski memilih keluar dari Partai Buruh, Ferri menegaskan proses tersebut dilakukan secara baik-baik dan tetap menjaga hubungan persaudaraan. Ia mengibaratkan dinamika yang terjadi sebagai persoalan rumah tangga yang telah lama diupayakan penyelesaiannya, tetapi tidak menemukan titik temu.

“Masalah internal sebenarnya sudah lama kami coba selesaikan secara kekeluargaan, tetapi persoalannya terus bertambah hingga akhirnya, berdasarkan evaluasi dan masukan dari seluruh daerah, kami memutuskan cukup sampai di sini,” ujarnya.

Mengenai dampak politik dari keputusan tersebut, Ferri menilai keluarnya ORI akan memberikan pengaruh signifikan terhadap Partai Buruh. Ia mengklaim ORI bersa-

ma KSPSI merupakan organisasi inisiator terbesar dalam pembentukan partai.

“Kalau ditanya berapa persen pengaruhnya, ya otomatis separuhnya,” kata Ferri.

Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Partai Buruh Said Iqbal telah mengetahui rencana pengunduran dirinya sejak Kamis (25/6) malam, sehari sebelum keputusan tersebut diumumkan kepada publik.

Secara historis, Partai Buruh kembali hadir dalam kancah politik nasional setelah dideklarasikan pada 2021 sebagai kelanjutan perjuangan politik kelompok buruh, serikat pekerja, petani, nelayan, guru, tenaga honorer, dan berbagai organisasi masyarakat sipil. Kehadiran partai tersebut merupakan hasil konsolidasi sejumlah organisasi yang menginginkan representasi politik lebih kuat bagi kelompok pekerja di Indonesia.

Dalam sejarah politik Indonesia, dinamika internal partai hingga berujung pada pengunduran diri elite bukan merupakan hal baru. Sejumlah partai politik pernah mengalami perpecahan akibat perbedaan strategi, kepemimpinan maupun arah perjuangan. Fenomena serupa juga terjadi di berbagai negara, di mana partai-partai berbasis serikat pekerja atau gerakan buruh kerap menghadapi dinamika organisasi seiring perubahan orientasi politik dan kepentingan anggotanya.

Pengamat politik menilai setiap perubahan konfigurasi di tubuh partai berpotensi memengaruhi konsolidasi organisasi, terutama menjelang agenda politik nasional berikutnya. Namun demikian, dampak riil terhadap kekuatan elektoral maupun struktur partai akan sangat bergantung pada langkah konsolidasi yang dilakukan masing-masing pihak setelah peristiwa ini. (*)

Gubernur Sultra ASR Tinjau Jamaah Haji di Madinah, Pastikan Layanan Optimal



Laporan: Mashuri

MADINAH, BP- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, melakukan kunjungan langsung kepada jamaah haji asal Sulawesi Tenggara yang sedang berada di Madinah, Arab Saudi. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan jamaah sekaligus meninjau kualitas pelayanan yang diterima menjelang kepulangan mereka ke Indonesia.

Kunjungan berlangsung di Hotel 117 Madinah, tempat jamaah haji Sulawesi Tenggara menginap setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Makkah. Kehadiran gubernur disambut Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari yang juga bertugas sebagai Pembimbing Ibadah Kloter 32 UPG, Sunardin, bersama jajaran petugas haji.

Di hadapan Gubernur, Sunardin menyampaikan laporan bahwa seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji bagi jamaah Sulawesi Tenggara berjalan lancar. Menurutnya, pelayanan mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi hingga pembimbingan ibadah telah terlaksana sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi.

“Seluruh rangkaian ibadah jamaah asal Sulawesi Tenggara ber-

langsung dengan baik. Pelayanan yang diberikan kepada jamaah juga berjalan lancar, baik selama berada di Makkah maupun di Madinah,” ujar Sunardin saat memberikan laporan kepada Gubernur.

Usai menerima laporan, Andi Sumangerukka menyempatkan diri berkeliling ke kamar-kamar jamaah. Ia menyapa satu per satu jamaah serta memastikan kondisi kesehatan mereka menjelang jadwal kepulangan ke Tanah Air.

Dalam dialog yang berlangsung hangat, para jamaah menceritakan pengalaman selama menunaikan ibadah haji. Mereka juga menyampaikan rasa syukur karena seluruh tahapan ibadah dapat dijalankan dengan lancar hingga memasuki masa pemulangan.

“Kami merasa senang dan bangga karena Bapak Gubernur datang langsung menemui kami di Tanah Suci. Perhatian ini menjadi penyemangat bagi seluruh jamaah,” ungkap salah seorang jamaah saat berbincang dengan gubernur. Sunardin turut menyampaikan apresiasi atas kepedulian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap jamaah haji asal daerah tersebut. Menurutnya, kehadiran gubernur memberikan dukungan moral sekaligus menunjukkan perhatian pemerintah ke-

da masyarakat yang sedang menunaikan rukun Islam kelima.

“Atas nama petugas Kloter 32 UPG, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah hadir langsung melihat kondisi jamaah Sulawesi Tenggara di Madinah. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mengemban amanah membangun daerah,” kata Sunardin.

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bentuk pengawasan pemerintah daerah terhadap pelayanan jamaah haji. Selain memastikan seluruh jamaah dalam kondisi baik, pemerintah daerah juga ingin memperoleh gambaran langsung mengenai kualitas layanan yang diterima masyarakat selama berada di Arab Saudi.

Berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), jumlah jamaah haji asal Sulawesi Tenggara pada musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi mencapai 2.078 orang. Mereka tergabung dalam Kloter 23, 32, 34, 35, 36, 38, serta Kloter 39 yang merupakan kloter gabungan.

Kloter 32 dijadwalkan menjadi rombongan pertama yang kembali ke Indonesia melalui Bandara Madinah pada 24 Juni 2026 pukul 00.15 waktu Arab Saudi dan tiba di Embarkasi Makassar pada

hari yang sama pukul 19.15 Wita. Setelah menjalani masa istirahat, jamaah akan diterbangkan menuju Kota Kendari pada 25 atau 26 Juni 2026.

Pemulangan jamaah Sulawesi Tenggara selanjutnya dilakukan secara bertahap. Kloter 34, 35, 36, dan 38 dijadwalkan tiba di Indonesia pada rentang 26 hingga 30 Juni 2026, disusul Kloter 39 pada 1 Juli 2026, sementara 15 jamaah yang tergabung dalam Kloter 23 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke Sulawesi Tenggara pada 2 Juli 2026.

Secara historis, penyelenggaraan ibadah haji Indonesia terus mengalami peningkatan kualitas layanan sejak diterapkannya sistem pelayanan terpadu oleh Kementerian Agama dalam satu dekade terakhir. Transformasi digital melalui aplikasi Satu Haji, penggunaan kartu identitas elektronik jamaah, serta penguatan koordinasi antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi menjadi bagian dari upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan jamaah.

Dalam konteks internasional, Arab Saudi setiap tahun menerima jutaan umat Islam dari lebih dari 180 negara untuk menunaikan ibadah haji. Penyelenggaraan haji menjadi salah satu operasi pelayanan publik terbesar di dunia karena melibatkan pengelolaan transportasi, kesehatan, keamanan, dan akomodasi bagi jamaah lintas negara dalam waktu yang relatif singkat. Indonesia sendiri secara konsisten menjadi salah satu negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia.

Kunjungan Gubernur Andi Sumangerukka di Madinah memperlihatkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memberikan perhatian kepada warganya, tidak hanya sebelum keberangkatan tetapi juga selama menjalankan ibadah hingga proses pemulangan ke Tanah Air. Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan penyelenggara ibadah haji dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah. (*)

Kendari Targetkan UMKM Tembus Pasar Global Lewat Expo dan Bazar 2026

KENDARI, BP- Pemerintah Kota Kendari menargetkan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional melalui penyelenggaraan Expo dan Bazar UMKM 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional tersebut resmi dibuka Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, di Pelataran Kantor UPTD PLUT UMKM Kota Kendari, kawasan Kolam Retensi Boulevard Lepo-Lepo, Senin (22/6/2026).

Expo yang berlangsung selama empat hari, mulai 22 hingga 25 Juni 2026, tidak hanya menjadi ajang promosi produk lokal, tetapi juga dirancang sebagai wadah pertemuan para pengusaha UMKM dengan berbagai peluang pasar, jaringan bisnis, akses pembiayaan, serta transformasi digital. Pemerintah Kota Kendari menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah yang berbasis pada sektor usaha masyarakat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Kendari menegaskan bahwa pemerintah ingin produk-produk UMKM tidak berhenti pada pameran semata, melainkan mampu memasuki pusat perbelanjaan modern, hotel, restoran, hingga berbagai platform perdagangan digital di tingkat nasional maupun internasional.

“Saya ingin produk UMKM Kota Kendari tidak hanya memenuhi etalase hari ini, tetapi juga menguasai pusat perbelanjaan, hotel, restoran, hingga menembus marketplace digital nasional maupun internasional,” ujar Siska Karina Imran.

Menurut Wali Kota, keberhasilan tersebut hanya dapat dicapai apabila pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat membangun kolaborasi yang kuat. Ia menilai UMKM merupakan sektor yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat sehingga memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Siska juga mengingatkan bahwa ukuran kemajuan suatu daerah tidak hanya dilihat dari pembangunan fisik maupun tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Kesempatan masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf

hidup menjadi indikator penting dalam pembangunan yang inklusif.

“Di sinilah UMKM memegang peran strategis sebagai simbol kemandirian ekonomi, ruang kreativitas, dan penggerak utama ekonomi kerakyatan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, setiap produk yang dipamerkan dalam Expo dan Bazar UMKM merupakan hasil kerja keras para pengusaha yang membangun usahanya dari berbagai keterbatasan. Karena itu, Pemerintah Kota Kendari memberikan penghargaan kepada seluruh pengusaha UMKM yang terus bertahan dan berkembang di tengah dinamika ekonomi.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menjelaskan penggunaan istilah “pengusaha UMKM” sebagai bentuk penghormatan kepada pemilik usaha. Kebijakan itu mengikuti arahan Menteri UMKM yang mendorong penggunaan istilah tersebut menggantikan kata “pelaku UMKM” karena dinilai lebih mencerminkan penghargaan terhadap profesi wirausaha.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kota Kendari, Syarifuddin, mengatakan Expo dan Bazar UMKM 2026 merupakan tindak lanjut instruksi Kementerian UMKM dalam rangka memperingati Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah pada 22-25 Juni 2026.

“Kalau sebelumnya kita mengung tema sinergi dan kolaborasi, maka pada Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional tahun ini ditambah dengan inovasi. Jadi semangatnya adalah Sinergi, Kolaborasi, dan Inovasi,” jelas Syarifuddin.

Menurutnya, tema nasional tahun ini, “UMKM Terkoneksi, Tumbuh Berinovasi,” menekankan pentingnya konektivitas UMKM terhadap pasar, akses pembiayaan, digitalisasi, serta penguatan rantai pasok agar mampu berkembang secara berkelanjutan dan memiliki daya saing yang lebih tinggi.

Optimisme Pemerintah Kota Kendari turut didukung oleh meningkatnya posisi kota tersebut dalam berbagai forum internasional. Keberhasilan menjadi tuan rumah sejumlah agenda dunia, termasuk UCLG AS-PAC, serta terjalannya kerja sama dengan Kota

Yiwu, Tiongkok, dinilai membuka peluang baru bagi perluasan jaringan pemasaran produk-produk UMKM Kendari ke pasar global.

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan usaha masyarakat, Wali Kota Kendari menyerahkan bantuan modal usaha serta piagam penghargaan kepada sejumlah pengusaha UMKM yang dinilai memiliki komitmen tinggi sebagai nasabah teladan. Acara pembukaan turut dihadiri Wakil Wali Kota Kendari, Sekretaris Daerah Kota Kendari, unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, lurah, dan ratusan pengusaha UMKM dari berbagai wilayah di Kota Kendari.

Secara historis, sektor UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia sejak krisis ekonomi 1998. Ketika banyak perusahaan besar mengalami penurunan produksi, UMKM justru mampu bertahan dan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Hingga kini, UMKM tetap mendominasi struktur dunia usaha nasional dan menjadi salah satu penyumbang utama terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) Indonesia, sekaligus berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dalam konteks global, pengembangan UMKM juga menjadi perhatian berbagai negara dan lembaga internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan 27 Juni sebagai Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day (MSME Day) sejak 2017 sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi usaha kecil dan menengah dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Organisasi seperti OECD dan Bank Dunia juga menekankan digitalisasi, inovasi, serta perluasan akses pembiayaan sebagai faktor utama dalam meningkatkan daya saing UMKM di pasar internasional.

Melalui penyelenggaraan Expo dan Bazar UMKM 2026, Pemerintah Kota Kendari berharap lahir semakin banyak pengusaha lokal yang mampu mengembangkan produk berkualitas, memperluas jaringan pemasaran, serta menjadikan UMKM sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. (*)

MTQ XXXI Sultra Resmi Dibuka, Buton
Tengah Perkuat Ukhuwah Islamiyah,
Sekda Buteng Abdullah: MTQ Jadi
Momentum Memperkuat Persatuan Antar
Daerah Sultra



Melalui partisipasi dalam Pawai Ta'aruf dan Mobil Hias MTQ XXXI Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten Buton berharap semangat mencintai Al-Qur'an terus tumbuh di tengah masyarakat. Momentum tersebut juga diharapkan semakin memperkuat persatuan antardaerah, memperkokoh ukhuwah Islamiyah, serta memperkenalkan potensi budaya Kabupaten Buton kepada masyarakat Sulawesi Tenggara secara lebih luas.(*)

Melalui penyelenggaraan MTQ XXXI Sultra, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama pemerintah kabupaten dan kota berharap syiar Al-Qur'an semakin kuat, kualitas pembinaan generasi Qurani terus meningkat, serta semangat persatuan, toleransi, dan ukhuwah Islamiyah tetap terjaga sebagai fondasi pembangunan daerah. (*)

BPOM Permudah Sertifikasi Kosmetik Lewat PerBPOM 8 Tahun 2026



Kepala BPOM Taruna Ikrar

Peliput: Lisna

JAKARTA, BP-Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi menerapkan Peraturan BPOM (PerBPOM) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Regulasi baru tersebut dirancang untuk menyederhanakan proses sertifikasi industri kosmetik, mempercepat pelayanan perizinan, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap mutu, keamanan, dan kemanfaatan produk kosmetik yang beredar di Indonesia.

Peraturan yang ditetapkan pada 21 April 2026 itu menggantikan Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2021. Pembaruan dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan industri kosmetik nasional yang terus bertumbuh dan kebutuhan akan regulasi yang lebih adaptif terhadap iklim investasi serta kemudahan berusaha.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa penyederhanaan prosedur bukan berarti mengurangi standar pengawasan yang selama ini diterapkan pemerintah terhadap industri kosmetik.

“Regulasi terbaru ini menghadirkan berbagai penyederhanaan proses sertifikasi guna mendukung kemudahan berusaha tanpa mengurangi pemenuhan standar keamanan dan mutu kosmetik,” ujar Taruna Ikrar.

Sebagai bagian dari implementasi regulasi tersebut, BPOM menggelar Sosialisasi Menge-

nai Regulasi Terkini Sertifikasi CPKB (SMART CPKB) bertema “Langkah Cerdas Menuju Sertifikasi CPKB” di Aula Bhinneka Tunggal Ika (BPOM, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga, organisasi profesi, akademisi, pelaku usaha kosmetik, hingga lembaga swadaya masyarakat.

Melalui sosialisasi tersebut, BPOM berupaya menyamakan persepsi antara regulator dan pelaku usaha mengenai implementasi aturan baru. Selain meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan sertifikasi CPKB, kegiatan itu juga menjadi wadah memperkuat koordinasi agar penerapan regulasi berlangsung lebih efektif dan efisien.

Salah satu perubahan penting dalam PerBPOM Nomor 8 Tahun 2026 adalah penghapusan kewajiban persetujuan denah bangunan fasilitas produksi kosmetik. Selain itu, BPOM menerapkan mekanisme tunggal penghitungan waktu layanan sertifikasi menggunakan sistem clock on dan clock off, sehingga proses administrasi menjadi lebih sederhana dan transparan.

Regulasi tersebut juga memperjelas klasifikasi industri kosmetik golongan A dan golongan B. Industri yang hanya memperoleh Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB ditegaskan tidak diperbolehkan menerima kontrak produksi. Ketentuan ini disusun untuk mendorong peningkatan kapasitas industri agar mampu memenuhi stan-

dar CPKB secara utuh.

BPOM juga memberikan fleksibilitas administratif bagi pelaku usaha. Industri kosmetik yang sudah tidak lagi beroperasi dapat mengajukan pencabutan Sertifikat CPKB maupun Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB. Sementara itu, pembaruan sertifikat dapat diajukan paling cepat enam bulan sebelum masa berlakunya.

Tidak hanya itu, regulasi baru turut membuka peluang diversifikasi usaha melalui mekanisme Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Obat Kuasi. Kebijakan ini memungkinkan industri kosmetik memanfaatkan fasilitas produksinya secara lebih optimal tanpa mengabaikan standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik.

Untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha, BPOM memperkuat aspek penegakan hukum melalui penambahan sanksi administratif. Pelanggaran terhadap ketentuan PerBPOM Nomor 8 Tahun 2026 dapat dikenai penutupan sementara akses elektronik pengajuan notifikasi maupun permohonan Sertifikat CPKB hingga paling lama satu tahun. Selain itu, BPOM juga memiliki kewenangan membekukan sertifikat apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

“Dengan penetapan peraturan ini, industri kosmetik mendapat-

kan panduan yang lebih jelas, praktis dalam melakukan proses sertifikasi yang lebih transparan dan efisien, sehingga pelaku usaha, termasuk UMKM, diharapkan lebih mudah memenuhi persyaratan,” kata Taruna Ikrar.

Menurut Taruna Ikrar, regulasi tersebut juga menjadi pedoman baru bagi petugas BPOM dalam memberikan layanan sertifikasi dan melakukan pengawasan terhadap industri kosmetik. Kepastian hukum, kejelasan prosedur, serta penyederhanaan layanan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan, manfaat, dan mutu produk.

“BPOM berkomitmen mendampingi pelaku usaha agar kosmetik Indonesia tidak hanya dicintai di dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di pasar global. Kami ingin setiap produk yang lahir dari negeri ini menjadi simbol kualitas dan kepercayaan,” ujarnya.

Ia optimistis penerapan PerBPOM Nomor 8 Tahun 2026 akan semakin meningkatkan perlindungan masyarakat dari peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan. Di sisi lain, kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing industri kosmetik nasional di pasar internasional yang semakin kompetitif.

“Mari kita dukung bersama penerapan CPKB ini. Dengan standar yang lebih baik, kita wujudkan kosmetik Indonesia yang aman, berkualitas, dan membanggakan,” pungkash Taruna Ikrar.

Secara historis, penguatan regulasi kosmetik di Indonesia telah berlangsung secara bertahap. Pemerintah melalui BPOM sebelumnya menerbitkan PerBPOM Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, kemudian memperbaruinya melalui PerBPOM Nomor 33 Tahun 2021 mengenai Sertifikasi CPKB. Kehadiran PerBPOM Nomor 8 Tahun 2026 menjadi bagian dari penyempurnaan sistem pengawasan seiring meningkatnya jum-

Laporan: Ardi

JAKARTA, BP-Pemerintah menempatkan pembangunan ketahanan kesehatan nasional sebagai salah satu strategi utama untuk mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap). Penguatan industri kesehatan dalam negeri dinilai tidak hanya meningkatkan kemandirian nasional, tetapi juga menjadi motor pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri farmasi, vaksin, dan alat kesehatan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam High Level Roundtable Discussion: Building Regional and Global Health Resilience in ASEAN yang berlangsung di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Rabu (24/6). Forum yang dihadiri Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, serta Anggota DEN Mari Elka Pangestu itu menjadi bagian dari langkah ASEAN memasuki fase implementasi ketahanan kesehatan periode 2026 - 2030.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pengalaman pandemi COVID-19 telah membuktikan setiap negara akan mengutamakan kepentingan rakyatnya sendiri ketika terjadi krisis kesehatan global. Karena itu, Indonesia harus memiliki kemampuan memproduksi kebutuhan kesehatan secara mandiri.

“Belajar dari pandemi COVID-19, saat krisis melanda, setiap negara pasti akan menyelamatkan rakyatnya sendiri terlebih dahulu. Untuk itu, negara sebesar Indonesia dengan 280 juta penduduk wajib memiliki kedua-

lah industri kosmetik nasional dan berkembangnya inovasi produk.

Di tingkat internasional, penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) atau praktik pembuatan yang baik telah menjadi standar utama dalam industri kosmetik. Organisasi seperti International Organization for Standardization (ISO) melalui standar ISO 22716:2007

Ketahanan Kesehatan Jadi Fondasi Indonesia Keluar dari Middle-Income Trap

latan kesehatan sendiri, mulai dari vaksin hingga obat-obatan,” kata Budi Gunadi Sadikin. Menurut Budi, ketergantungan terhadap produk kesehatan impor secara bertahap mulai ditekan. Jika sebelumnya lebih dari 90 persen kebutuhan nasional masih berasal dari luar negeri, kini porsi telah turun menjadi sekitar 70-80 persen. Pemerintah juga memfasilitasi produksi 35 jenis bahan baku obat (Active Pharmaceutical Ingredients/API) di dalam negeri agar rantai industri farmasi nasional semakin kuat.

Selain memperkuat sektor hulu, pemerintah terus mengembangkan hilirisasi industri kesehatan. Salah satu proyek strategis yang sedang dibangun adalah pabrik pengolahan plasma darah di Karawang yang ditargetkan mulai berproduksi pada awal 2027 untuk menghasilkan Albumin dan Immunoglobulin, dua produk yang selama ini masih bergantung pada impor.

“Kita ingin belanja kesehatan kita yang tumbuh 12-13 persen per tahun itu tidak lari ke luar negeri, tetapi berputar di dalam negeri untuk menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan PDB,” ujar Budi.

Di sektor vaksin, Indonesia juga memperbesar kapasitas produksinya. Saat ini terdapat tiga perusahaan vaksin nasional dengan kapasitas yang meningkat hingga 60 persen. Pemerintah bahkan mulai memosisikan Indonesia sebagai pusat riset kesehatan di kawasan ASEAN melalui berbagai uji klinik vaksin, termasuk vaksin tuberkulosis (TBC), malaria, dengue, dan PCV13.

Untuk mendukung penguasaan teknologi, Kementerian Kesehatan mengirim tenaga ahli

Indonesia mengikuti pelatihan biomanufaktur dan teknologi messenger RNA (mRNA) di Tsinghua University serta Leiden Biotech. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat penguasaan teknologi mutakhir dalam pengembangan vaksin nasional.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa penguatan sektor kesehatan memiliki kaitan langsung dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sebesar 7 hingga 8 persen.

“Kesehatan adalah kunci. Dengan bantuan teknologi berbasis AI, Indonesia akan menjadi lebih transparan dan efisien. Jika ekosistem kesehatan ini terbangun mandiri, kita sangat optimistis ekonomi kita tumbuh sesuai target,” kata Luhut.

Sementara itu, Anggota DEN Mari Elka Pangestu menilai ASEAN memiliki peluang besar membangun industri kesehatan regional. Dengan jumlah penduduk sekitar 650 juta jiwa, kawasan Asia Tenggara dinilai mampu menciptakan rantai pasok vaksin yang lebih kuat sehingga tidak lagi terlalu bergantung pada negara-negara di luar kawasan ketika menghadapi pandemi berikutnya.

“Kita punya pasar 650 juta jiwa di ASEAN. Ini kekuatan besar untuk mendukung industri vaksin regional. Kita harus punya sistem rantai pasok bersama agar saat ada ancaman pandemi lagi, kita sudah siap secara kolektif,” ujar Mari Elka Pangestu.

Sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan nasional, Kemen-

telah menetapkan pedoman GMP kosmetik yang diadopsi di berbagai negara, termasuk kawasan Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan sejumlah negara ASEAN. Harmonisasi standar tersebut bertujuan menjamin keamanan produk sekaligus memperlancar perdagangan kosmetik lintas negara.

Dengan regulasi yang lebih sederhana namun

tetap mengedepankan aspek pengawasan, BPOM berharap industri kosmetik Indonesia mampu tumbuh lebih kompetitif, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha termasuk UMKM, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk kosmetik dalam negeri yang aman, bermutu, dan berdaya saing global.(*)

PT FAREN GRAFIKA KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi	Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasatio Korlip: Firman Redaktur: Kasrun,Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman	Layouter: Rinin Pracetak: Aditya Cetak Jamaludin	Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana	Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks
Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara				

Komisi III Minta Kenaikan Kepercayaan Publik Harus Menjadi Pemacu Reformasi Polri



Ketua Komisi III Habiburokhman merespons hasil survei Litbang Kompas yang mencatat tingkat kepercayaan publik, kepuasan publik, dan citra terhadap Polri mengalami kenaikan.

Laporan: Amran

JAKARTA, BP- III DPR RI mengapresiasi meningkatnya tingkat kepercayaan, kepuasan, dan citra publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana tercermin dalam hasil Survei Litbang Kompas. Meski menunjukkan tren positif, DPR mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat institusi kepolisian berpuas diri, melainkan dijadikan momentum untuk memperkuat reformasi kelembagaan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hasil Survei Litbang Kompas mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 82,4 persen pada 2026, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 76,2 persen. Pada saat yang sama, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri naik menjadi 67,6 persen dari sebelumnya 65,1 persen, sementara citra kelembagaan meningkat dari 64,4 persen menjadi 71,5 persen.

Survei tersebut dilaksanakan pada 9-18 April 2026 melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat dengan tingkat ke-

percayaan 95 persen dan margin of error sebesar 2,83 persen.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai hasil survei tersebut menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian yang selama beberapa tahun terakhir terus melakukan pembenahan di berbagai sektor pelayanan dan penegakan hukum.

“Angka kepercayaan publik sebesar 82,4 persen ini bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan bukti riil yang dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, peningkatan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh personel Polri, mulai dari tingkat Markas Besar hingga Bhabinkamtibmas yang menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di berbagai daerah.

Habiburokhman mengatakan, Komisi III juga mengamati adanya perubahan pendekatan Polri dalam setahun terakhir. Aparat kepolisian dinilai semakin mengedepankan pelayanan yang humanis, persuasif, dan solutif dibandingkan pendekatan represif semata.

“Polisi kini lebih dekat, lebih ramah, dan lebih cepat mer-

espons aduan warga. Perubahan kultur ini yang membuat masyarakat merasa aman dan nyaman,” ujarnya.

Meski memberikan apresiasi, Komisi III mengingatkan bahwa hasil survei bukanlah tujuan akhir. DPR meminta Polri menjadikan capaian tersebut sebagai dorongan untuk terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.

“Capaian ini jangan membuat jajaran kepolisian cepat berpuas diri. Jadikan hasil survei ini sebagai vitamin dan motivasi untuk terus mempertahankan prestasi, memperbaiki kekurangan yang masih ada, dan tetap konsisten menjadi pelindung serta pengayom masyarakat Indonesia,” tegas Habiburokhman.

Litbang Kompas menilai meningkatnya citra positif Polri tidak terlepas dari semakin intensifnya pelibatan anggota kepolisian sebagai ujung tombak pelayanan negara di lapangan. Kehadiran aparat dalam menjaga keamanan, memberikan pelayanan, serta menyelesaikan persoalan masyarakat dinilai memperkuat persepsi positif publik terhadap institusi tersebut.

Secara historis, tingkat kepercayaan masyarakat terha-

dap Polri mengalami dinamika sejak era Reformasi 1998, ketika Kepolisian dipisahkan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui kebijakan reformasi sektor keamanan. Sejak saat itu, berbagai program modernisasi organisasi, peningkatan profesionalisme, reformasi birokrasi, serta penguatan pelayanan publik terus dilakukan sebagai bagian dari transformasi kelembagaan.

Dalam konteks internasional, peningkatan kepercayaan terhadap institusi kepolisian juga menjadi indikator penting kualitas tata kelola pemerintahan. Sejumlah negara seperti Jepang, Singapura, Finlandia, dan Selandia Baru secara konsisten mempertahankan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap aparat penegak hukum melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pelayanan berbasis masyarakat (community policing), serta pengawasan yang kuat terhadap kinerja kepolisian. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan publik harus dipelihara melalui konsistensi pelayanan dan reformasi yang berkelanjutan.(*)

Polisi Ungkap Motif Taufik Aniaya dan Sekap Kekasih Selama Tiga Tahun



Laporan: Hadi

JAKARTA, BP- Kepolisian Daerah Jawa Barat mengungkap motif di balik kasus penyekapan dan penganiayaan yang diduga dilakukan Taufik Hidayat (30) terhadap kekasihnya, YTR (29), selama kurang lebih tiga tahun di sebuah kamar kos di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, aksi kekerasan tersebut dipicu oleh rasa cemburu yang berlebihan serta luapan emosi pelaku akibat persoalan pekerjaan.

Pelaku yang telah ditangkap pada Rabu, 23 Juni 2026, di wilayah Ciparay, Kabupaten Bandung, kini resmi menyandang status tersangka. Penyidik menjeratnya dengan sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, termasuk pasal tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, penyanderaan, dan perampasan kemerdekaan.

Kapolda Jawa Barat Irfen Ruddi Setiawan mengatakan, hasil pemeriksaan terhadap korban menunjukkan bahwa konflik di antara keduanya berulang kali dipicu oleh kecemburuan pelaku yang tidak terkendali. Situasi itu diperparah ketika pelaku mengalami tekanan dalam pekerjaannya sebagai penagih utang atau debt collector.

“Korban memberikan keterangan bahwa pelaku memiliki rasa cemburu yang besar. Ketika mengalami kesulitan dalam pekerjaannya sebagai debt collector, sering terjadi cekcok yang berujung pada kekerasan,” ujar Irfen Ruddi Setiawan, Sabtu (27/6).

Menurut penyidik, korban mengaku kerap menjadi sasaran pelampiasan kemarahan pelaku setiap kali Taufik menghadapi hambatan saat bekerja. Kondisi tersebut berlangsung berulang dalam rentang waktu yang cukup lama hingga akhir-

irnya kasus tersebut terungkap kepada aparat kepolisian.

Tidak hanya itu, penyidik juga menemukan fakta lain setelah memeriksa kedua orang tua tersangka. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa sifat temperamental Taufik bukan baru muncul belakangan, melainkan telah terlihat dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga.

“Kalau kemauannya tidak dipenuhi atau pulang ke rumah tidak mendapatkan makanan sesuai harapan, bapaknya dicari dan dipukul. Perlakuannya memang temperamental dan emosional,” kata Rud- di.

Polisi menyebut temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa pelaku memiliki kecenderungan menggunakan kekerasan sebagai cara melampiaskan emosi. Keterangan keluarga menjadi salah satu bagian penting dalam melengkapi konstruksi penyidikan terhadap tersangka.

Di sisi lain, kondisi korban YTR terus menunjukkan perkembangan yang mengembirakan. Setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, korban mulai dapat berkomunikasi, makan secara mandiri, dan mampu duduk tanpa bantuan.

“Kondisi korban terus mengalami perkembangan positif selama menjalani perawatan intensif,” ungkap pihak kepolisian berdasarkan hasil pemantauan terhadap proses pemulihan korban.

Dalam proses hukum yang sedang berjalan, penyidik menjerat Taufik dengan Pasal 466 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Dalam perkara ini, korban dilaporkan mengalami luka fisik serius, termasuk gangguan permanen pada fungsi penglihatannya.

Selain itu, tersangka juga dikenakan Pasal 451 KUHP tentang penyanderaan yang memi-

liki ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Polisi turut menerapkan Pasal 446 KUHP mengenai perampasan kemerdekaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman pidana maksimal sembilan tahun.

Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya deteksi dini terhadap kekerasan dalam hubungan personal maupun kekerasan dalam rumah tangga. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai laporan nasional menunjukkan bahwa kasus kekerasan berbasis gender masih menjadi tantangan serius. Data tahunan yang dirilis Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) secara konsisten mencatat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, dengan kekerasan fisik dan psikis menjadi bentuk yang paling banyak dilaporkan.

Secara internasional, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga pernah melaporkan bahwa sekitar satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual sepanjang hidupnya, sebagian besar dilakukan oleh pasangan intim. Temuan tersebut menempatkan kekerasan dalam relasi personal sebagai salah satu persoalan hak asasi manusia yang mendapat perhatian global dan membutuhkan penanganan terpadu, mulai dari penegakan hukum, perlindungan korban, hingga pemulihan psikologis.

Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR kini masih terus didalami penyidik untuk melengkapi alat bukti serta memastikan seluruh rangkaian tindak pidana yang dilakukan tersangka dapat diungkap secara utuh. Kepolisian menegaskan proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara korban tetap memperoleh pendampingan medis dan perlindungan selama proses penyidikan berlangsung.(*)

Wali Kota Baubau HYF Perkuat Sinergi Pangan Bersama Pemkab Konawe untuk Kendalikan Inflasi



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui pembaruan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di sektor pertanian dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe. Kesepakatan yang ditandatangani Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, SE bersama Bupati Konawe Yusran Akbar di Unaaha, Kabupaten Konawe, Rabu (24/6/2026), menjadi langkah lanjutan untuk menjamin ketersediaan pangan, memperlancar distribusi komoditas, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Kota Baubau.

Sekretaris Daerah Kota Baubau, La Ode Darussalam, S.Sos., M.Si., mengatakan kerja sama tersebut bukan merupakan kesepakatan baru, melainkan pembaruan terhadap MoU yang telah berjalan sebelumnya. Penyempurnaan dilakukan agar isi kesepakatan lebih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi dan tantangan pengendalian inflasi yang di-

adapi daerah.

"Penandatanganan MoU itu adalah pembaruan atau revisi untuk menyempurnakan kembali MoU kita dengan Pemerintah Kabupaten Konawe terkait dengan penanganan inflasi yang ada di Kota Baubau," kata La Ode Darussalam.

Menurut dia, beberapa klausul dalam kesepakatan lama diperbaiki untuk memperkuat rantai pasok pangan antardaerah. Pemkab Konawe dipilih sebagai mitra strategis karena selama ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi pangan terbesar di Sulawesi Tenggara yang mampu menopang kebutuhan beras dan komoditas pangan bagi sejumlah kabupaten dan kota di wilayah tersebut.

"Terdapat beberapa poin dari MoU terdahulu yang diperbaiki guna memperlancar alur distribusi. Kemudian memanfaatkan status Kabupaten Konawe sebagai lumbung pangan Sulawesi Tenggara untuk menyuplai kebutuhan pokok masyarakat Baubau," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan

MoU, Pemkot Baubau akan segera menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melibatkan distributor beras di Kabupaten Konawe. Langkah teknis tersebut diharapkan mampu memastikan pasokan beras ke Kota Baubau berlangsung secara berkesinambungan dengan harga yang lebih stabil.

"Kerja sama ini sangat penting. Setelah MoU ini, kita juga akan melakukan PKS bersama dengan para distributor beras yang ada di Kabupaten Konawe," ungkap La Ode Darussalam.

Ia optimistis sinergi antarpemerintah daerah yang dibangun bersama pelaku usaha akan memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, stabilitas pasokan merupakan faktor penting dalam mengendalikan gejolak harga, terutama terhadap komoditas pangan yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi daerah.

"Melalui kerja sama ini, kami berharap pasokan komoditas pangan utama di Kota Baubau dapat terpenuhi

secara berkelanjutan dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat," tuturnya.

Secara historis, kerja sama antardaerah dalam pengendalian inflasi telah menjadi salah satu strategi nasional sejak pemerintah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada 2008. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat juga mendorong skema Kerja Sama Antardaerah (KAD) sebagai upaya memperkuat distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit guna menekan disparitas harga dan menjaga inflasi tetap terkendali. Di tingkat internasional, model kolaborasi rantai pasok antardaerah maupun antarwilayah juga diterapkan di berbagai negara seperti Jepang dan Korea Selatan untuk memperkuat ketahanan pangan serta meminimalkan gangguan distribusi akibat gejolak ekonomi maupun perubahan iklim.

Pembaruan MoU antara Pemkot Baubau dan Pemkab Konawe tersebut menjadi bagian dari komitmen kedua daerah dalam memperkuat ketahanan pangan, menjaga kelancaran distribusi komoditas strategis, serta mendukung kebijakan nasional pengendalian inflasi. Dengan memanfaatkan potensi Konawe sebagai lumbung pangan Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kota Baubau berharap stabilitas harga kebutuhan pokok dapat terus terjaga sehingga aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tetap terpelihara. (*)

Andi Hamzah Minta OPD Rampungkan Klasifikasi Informasi Demi Kota Informatif 2026, OPD Baubau Diberi Tenggat Dua Pekan



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau mempercepat langkah menuju predikat Kota Informatif 2026 dengan mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menuntaskan penyusunan dokumen klasifikasi informasi publik dalam waktu dua minggu. Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi evaluasi keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.

Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau H. Andi Hamzah Machmud, S.Sos., M.Si saat menutup kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Desk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menghadirkan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara di Kota Baubau, Selasa (23/6/2026). Menurutnya, seluruh OPD akan menjadi objek penilaian sehingga kesiapan administrasi maupun sistem informasi harus diselesaikan dalam waktu singkat.

"Penilaian Kota Informatif akan dimulai bulan Agustus nanti dan sam-pelnya adalah kita semua, seluruh OPD. Saya memberikan waktu dua minggu agar ilmu yang diperoleh hari ini langsung diterapkan," kata Andi Hamzah.

Ia menjelaskan, fokus persiapan saat ini diarahkan pada dua aspek utama, yakni pembenahan sistem digital dan penyempurnaan dokumen pendukung. Web-

site PPID Utama tengah direviu agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sementara seluruh website OPD akan dilengkapi sub-menu PPID yang terintegrasi dengan PPID Utama sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan mudah diakses.

Selain pembaruan sistem digital, seluruh OPD diwajibkan menyusun empat jenis daftar klasifikasi informasi, yaitu informasi berkala, informasi serta-merta, informasi setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. Dokumen tersebut harus ditandatangani oleh kepala OPD masing-masing sebelum diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam bentuk hard copy paling lambat dua minggu setelah pelaksanaan Bimtek.

"Ini bukan kapasitas saya memaksa, melainkan karena memang waktu penilaian sudah sangat dekat. Yang kita kejar bukan hanya kelengkapan administrasi, tetapi kualitas pelayanan informasi publik," ujarnya.

Andi Hamzah menegaskan, keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik menyediakan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Karena itu, penguatan pelayanan informasi telah ditetapkan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Baubau dalam lima tahun mendatang.

Ia juga kembali mengingatkan pentingnya mekanisme satu pintu dalam

penyebarluasan informasi pemerintahan. Setiap informasi yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kota Baubau harus melalui koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama. Struktur tersebut diperkuat dengan Sekretaris Daerah sebagai Atasan PPID Utama, sedangkan Wali Kota Baubau bertindak sebagai Pembina PPID.

"Sekarang saatnya kita menuntut outcome kerja bersama untuk mengantar daerah kita menjadi Kota Informatif 2026. Kita pernah meraih urutan ketiga, dan tahun ini mudah-mudahan dengan komitmen bersama kita bisa meraih posisi yang lebih tinggi," ujar Andi Hamzah.

Secara historis, implementasi keterbukaan informasi di Indonesia memasuki babak baru sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang efektif diterapkan pada 2010 dan menjadi tonggak reformasi transparansi pemerintahan. Di tingkat internasional, prinsip Freedom of Information telah lebih dahulu berkembang melalui kebijakan keterbukaan dokumen publik di sejumlah negara, dimulai oleh Swedia melalui Freedom of the Press Act tahun 1766 yang dikenal sebagai salah satu regulasi keterbukaan informasi tertua di dunia. Di Kota Baubau sendiri, rekam jejak keterbukaan informasi menunjukkan tren positif setelah dua tahun lalu berhasil menempati peringkat ketiga dalam evaluasi keterbukaan informasi tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga target meraih predikat Kota Informatif 2026 dinilai realistis apabila seluruh OPD mampu memenuhi indikator penilaian secara optimal. (*)

Pemkot Baubau Siapkan Nobar Piala Dunia 2026, Gandeng Komunitas dan Pelaku Usaha

Laporan: Andina

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau mulai mematangkan persiapan pelaksanaan nonton bareng (nobar) Piala Dunia FIFA 2026 melalui rapat koordinasi lintas instansi sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan nobar berlangsung tertib, legal, terkoordinasi, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui keterlibatan komunitas sepak bola, pelaku usaha, serta berbagai instansi pemerintah.

Rapat koordinasi dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Baubau, Dr. Dahrul Dahlan, S.STP, M.Si., serta dihadiri Asisten Admin-

istrasi Umum Setda Kota Baubau Sitti Munawar, S.STP, M.Si., Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Safrin, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), serta Staf Khusus Wali Kota Baubau Dr. Sunaryo Mulyo, M.T. dan Drs. MZ Tamisil Tamim, M.Si.

Dalam keterangannya usai rapat, Dahrul Dahlan mengatakan pemerintah tengah menyusun langkah-langkah teknis agar pelaksanaan nobar dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. "Pertemuan ini bertujuan menyusun langkah-langkah teknis sehingga pelaksanaan nonton bareng di Kota Baubau dapat berlangsung tertib, terkoordinasi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Salah satu hasil rapat adalah penyampaian

informasi dari TVRI mengenai mekanisme penggunaan barcode sebagai akses siaran resmi pertandingan. Barcode tersebut nantinya akan didistribusikan ke seluruh titik penyelenggaraan nobar agar masyarakat dapat menyaksikan pertandingan melalui jalur resmi.

"TVRI sudah menyampai-kan hak akses melalui barcode. Barcode itu akan didistribusikan ke titik-titik penyelenggaraan sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan," kata Dahrul.

Pemerintah Kota Baubau juga akan menghimpun surat kepada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, maupun pelaku usaha yang berencana menggelar nobar secara mandiri. Seluruh penyelenggara diminta melaporkan lokasi kegiatan sebagai

bahan pendataan pemerintah yang selanjutnya diteruskan kepada kementerian terkait dan TVRI. "Setiap penyelenggara diharapkan melaporkan titik lokasi kegiatan sebagai bagian dari laporan resmi pemerintah kepada kementerian dan pihak terkait," ujarnya.

Selain melakukan pendataan, pemerintah juga akan menggandeng komunitas sepak bola di Kota Baubau untuk ikut menyukseskan pelaksanaan nobar, baik yang dipusatkan pemerintah maupun yang dilaksanakan secara mandiri. Menurut Dahrul, jadwal pelaksanaan nobar akan disesuaikan dengan pertandingan yang paling diminati masyarakat. Informasi mengenai lokasi dan jadwal akan dihimpun dari seluruh penyelenggara, kemu-

dian dipublikasikan melalui media sosial serta kanal informasi resmi pemerintah. "Jadwal nonton bareng akan mengikuti antusiasme masyarakat terhadap pertandingan tertentu sehingga informasi penyelenggara akan kami himpun dan publikasikan secara luas," katanya.

Pemerintah berharap penyelenggaraan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan dan pemererat kebersamaan warga, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran masyarakat di lokasi nobar diperkirakan membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, sektor kuliner, hingga pelaku ekonomi kreatif untuk meningkatkan omzet selama berlangsungnya pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut.

Secara historis, penyelenggaraan nonton bareng ajang olahraga internasional telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia sejak Piala Dunia FIFA 2002, ketika siaran langsung pertandingan mulai dinikmati secara luas di ruang-ruang pub-

lik. Tradisi tersebut semakin berkembang pada edisi Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, 2014 di Brasil, 2018 di Rusia, hingga 2022 di Qatar, yang terbukti mampu menggerakkan sektor usaha kecil, kuliner, serta industri kreatif di berbagai daerah. Adapun Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta dan diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sekaligus menjadi penyelenggaraan pertama yang melibatkan tiga negara tuan rumah dalam era modern kompetisi tersebut.

Melalui persiapan sejak dini, Pemerintah Kota Baubau berharap pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026 dapat berlangsung aman, tertib, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Kolaborasi pemerintah, komunitas sepak bola, pelaku usaha, TVRI, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar momentum pesta sepak bola dunia tersebut dapat dinikmati secara luas sekaligus memberi nilai tambah bagi perekonomian daerah. (*)